
**DINAMIKA POLITIK NAHDLATUL ULAMA
DI MANADO TAHUN 1960-1998**

Lisa Aisyiah Rasyid
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Manado
lisa.rasyid@iain-manado.ac.id

Abstract

This paper examines the transformation of NU organization in Manado in 1960-1998, because studies related to Islamic organizations in Manado are still lacking. Even though historically Islamic organizations like NU have made significant contributions to the development of society, especially Muslims in Manado, from a social, religious, educational, economic, and political perspective. The importance of tracing history related to NU and its transformation in Manado, this study aims to explain how the history of the formation of NU in Manado and how was the transformation of NU in Manado from 1960-1998? This study is limited to 1960-1998, because in 1960 it is estimated that the first NU management was formed in Manado City. Meanwhile, 1998 was a year of division within the NU body in Manado City because of the NU central policy which then declared PKB as a party formed by and for NU members, but open to anyone, including non-Muslims. Historical research methods are used in this paper with heuristic stages, source verification, interpretation, and historiography. This paper shows that the formation of the NU branch in Manado is thought to have taken place in 1960 by Habib Abdurrahman Mulachele. Previously, several Islamic organizations had been established, such as Sarikat Islam (SI) in 1920, Muhammadiyah (1934), and Alkhairaat (1947). Since its formation in 1960, it was found that NU's transformation until 1998 experienced ups and downs.

Keywords: History of Nahdlatul Ulama, Institutional History,

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang transformasi NU di Manado pada tahun 1960-1998, sebab kajian terkait ormas Islam di Manado masih sangat kurang. Padahal secara historis ormas Islam seperti NU memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan masyarakat khususnya muslim di Manado baik dari segi sosial, keagamaan, Pendidikan, ekonomi dan politik. Pentingnya penelusuran historis terkait NU dan transformasinya di Manado, maka kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya NU di Manado dan bagaimana transformasi NU di Manado sejak tahun 1960-1998?. Kajian ini dibatasi pada tahun 1960-1998, sebab pada tahun 1960 diperkirakan telah terbentuk kepengurusan NU untuk pertama kalinya di Kota Manado. Sedangkan tahun 1998, merupakan tahun perpecahan di tubuh NU Kota Manado sebab kebijakan NU pusat yang kemudian mendeklarasikan PKB sebagai partai yang dibentuk oleh dan untuk warga NU, namun secara keanggotaan terbuka bagi siapapun termasuk masyarakat non Muslim. Metode penelitian sejarah digunakan dalam tulisan ini dengan tahapan heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi. Tulisan ini menunjukkan bahwa pembentukan cabang NU di Manado diperkirakan terjadi pada tahun 1960 oleh Habib Abdurrahman Mulachele. Sebelumnya sudah berdiri beberapa organisasi Islam, seperti Sarikat Islam (SI) tahun 1920, Muhammadiyah (1934), dan Alkhairaat (1947). Sejak terbentuknya pada tahun 1960, ditemukan bahwa tranformasi NU hingga tahun 1998 mengalami perkembangan yang pasang-surut.

Kata kunci: Sejarah Nahdlatul Ulama, Sejarah Kelembagaan

Pendahuluan

Awal abad ke-20 muncul berbagai gerakan pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, dengan tujuan melepaskan diri dari kebodohan, kemiskinan dan penjajahan. Gerakan ini pada awalnya dimotori oleh kelompok Muslim modernis, seperti Sarikat Islam (SI) tahun 1911 (Bruinessen, 2017: 17) dan Muhammadiyah tahun 1912 (Ricklefs, 2013: 54) yang secara doktrinal tampak dekat dengan paham wahabi (Suma, 2014: 89). Tak lama kemudian, tahun 1926 munculah NU sebagai gerakan perlawanan terhadap puritanisme Islam oleh kelompok modernis tersebut.

Pada tahun 1952, NU kemudian berkembang menjadi sebuah partai yang diberi nama Partai Nahdhatul Ulama (PNU), yang lahir pada masa Orde Lama dan termasuk salah satu partai terkuat pada masa itu. Menurut Bruinessen (1994: 66-67), kelahiran PNU lebih dilatarbelakangi oleh pandangan sebelah mata kaum reformis terhadap ulama NU, yang saat itu sama-sama tergabung dalam satu partai yaitu Masyumi. Bagi mereka, para ulama tersebut hanyalah hasil asuhan pesantren yang tidak canggih dan tidak sejalan dengan ajaran Islam yang sebenarnya.

NU awalnya merupakan organisasi sosial keagamaan yang didirikan di Surabaya pada tahun 1926 oleh para ulama dengan tokoh utamanya K.H Hasyim Asy'ari. Para ulama pendukung organisasi ini, pada umumnya adalah pengasuh pondok pesantren (Daman, 2001: 43). Adapun tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk memelihara tetap tegaknya ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* di Indonesia (Kristeva, 2014: 174).

Setelah resmi keluar dari Masyumi pada tahun 1952, maka pada pemilihan umum (pemilu) tahun 1955, NU masuk menjadi peserta dan mendapat kesuksesan yang luar biasa dengan meraih suara terbesar ketiga yakni 18,4 % suara. Perolehan suara terbesar kedua diraih oleh Masyumi yang memperoleh 20,9 % suara, sedang yang pertama adalah Partai Nasional Indonesia dengan perolehan 22,3 % suara (Feillard, 2009: 44).

Kuatnya pengaruh NU di pusat, membuatnya berkembang hingga ke wilayah Kota Manado, tepatnya pada 1960 dibentuklah struktur kepengurusan NU pertama kalinya di Manado. Pada periode berikutnya, yakni masa Orde Baru, NU mengalami masa tersulitnya sebab pada masa ini, aktivitas NU di Manado secara organisatoris, bisa dibilang “mati suri”. Keadaan tersebut sebagai akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang sangat menekan dan semakin mempersulit posisi NU yang secara politik dianggap sebagai “lawan” terberat pemerintahan Orde Baru ketika itu (Shodiq, 2008: 105). Kondisi demikian akhirnya memaksa NU (partai) mengambil keputusan penting pada tahun 1984, yakni kembali ke *Khittah* 1926 dan secara organisatoris tidak lagi berpolitik praktis (Muhtadi, 2004: 182).

Pada akhir tahun 1986 para tokoh NU dengan diketuai K.H. Hasyim Arsyad, berkumpul untuk mengadakan rapat, membentuk kembali kepengurusan NU yang baru. Hasil rapat tersebut kemudian memutuskan K.H. Hasyim Arsyad sebagai Rais Syuriah periode 1987-1992. Pada periode berikutnya, ketika masa Orde Baru berakhir tahun 1998, NU secara mengejutkan mendeklarasikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai satu-satunya partai politik yang dibentuk oleh dan untuk warga NU (Shodiq, 2008: 110-111). Meskipun begitu, PKB tetaplah partai Nasional yang bisa dimasuki oleh siapapun, dengan latar belakang mazhab atau

organisasi agama manapun, karena partai ini tidak semata-mata partainya orang NU (Anwar, 2004: 157).

Deklarasi ini menimbulkan perpecahan di tubuh NU kota Manado, sebab bagi mereka jika orang-orang non Muslim kemudian bergabung dalam PKB, maka semakin kecil peluang untuk bisa mengimbangi dominasi Kristen pada bidang politik di pemerintahan Kota Manado. Selain itu, warga NU Manado juga mencegah agar NU tidak menjadi tunggangan politik bagi segelintir orang yang secara tidak langsung mengatas namakan NU hanya untuk kepentingan pribadinya. Sehingga tidak heran jika sebagian besar elit NU, banyak yang kemudian lebih memilih berafiliasi ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai partai yang mewakili suara masyarakat Islam di Manado.

Berbagai kebijakan pengurus NU di pusat yang sering mewarnai dinamika politik di tubuh NU, serta besarnya potensi yang dimiliki NU sebagai organisasi sosial-keagamaan yang juga memiliki orientasi politik, membuat kajian ini menjadi penting dan menarik khususnya di wilayah Kota Manado.

Sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama di Manado

Sejak berdirinya pada tahun 1926 hingga tahun 1929, perkembangan cabang NU baru mencakup Jawa dan Madura. Perluasan cabang NU hingga ke luar Pulau Jawa, baru terjadi pada tahun 1930-an, yaitu cabang Banjar Martapura di Kalimantan. Usaha perintisan, perluasan dan pengembangan NU terus digalakkan melalui *Lajnah Nasihin* (dibentuk pada Mukhtamar NU ketiga tahun 1928), sebagai komisi yang bertanggung jawab atas perluasan dan pengembangan NU ke berbagai daerah baru (Anam, 1985: 92). Setelah itu, perkembangan cabang-cabang NU meluas hingga ke berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hingga akhir tahun 2000, jaringan organisasi NU meliputi (NU Online: 2016):

- 31 Pengurus Wilayah
- 339 Pengurus Cabang
- 12 Pengurus Cabang Istimewa
- 2.630 Majelis Wakil Cabang
- 37.125 Pengurus Ranting.

Salah satu yang menjadi tempat pertumbuhan dan wadah pengembangan sayap organisasi ini di antaranya adalah Kota Manado. Pembentukan cabang NU di Manado diperkirakan terjadi pada tahun 1960 oleh Habib Abdurrahman Mulachele. Sebelumnya sudah berdiri beberapa organisasi Islam, seperti Sarikat Islam (SI) tahun 1920, Muhammadiyah (1934), dan Alkhairaat (1947).

Masuknya SI ini dimanfaatkan untuk menumbuhkan-kembangkan semangat keislaman, sekaligus mengimbangi pengaruh pendidikan Zending yang mereka anggap dapat melemahkan syiar Islam yang sudah dianut Sebagian kecil penduduk Manado. Sementara kehadiran Muhammadiyah ini telah memperkuat barisan dakwah Islam di Manado pada masa kolonial.

Adapun kehadiran Alkhairaat, sangat berperan terhadap perkembangan *Madrasah Diniyah* terutama “pesantren” di Sulawesi Utara. Alkhairaat di Manado, merupakan perluasan

dari cabang Alkhairaat Pusat Palu, dan dalam waktu relatif singkat telah mendapatkan banyak pengikut yang kemudian disebut sebagai *Abnaul Khairaat*.

Dalam perjalanannya, banyak di antara *Abnaul Khairaat* yang kemudian menjadi anggota NU cabang Manado yang berdiri pada tahun 1960 oleh Habib Abdurrahman Mulachele. Pendirian cabang NU di Manado pada tahun 1960, terjadi setelah didirikannya cabang NU di Palu pada tahun yang sama, setelah mendapatkan restu dan izin dari Guru Tua, yakni Sayyid Idrus bin Salim Aljufri (Dg. Siame, 2016).

Meski NU baru terbentuk di Manado pada tahun 1960, tetapi secara kultural, NU di Manado diperkirakan sudah ada sejak masuknya Alkhairaat di Manado pada tahun 1934, atau bahkan mungkin jauh sebelumnya. Ketidak pastian mengenai awal kehadiran NU di Manado, disebabkan oleh kurang terdokumentasinya rekam jejak NU di berbagai daerah termasuk Manado.

Seperti NU di tingkat nasional, tujuan berdirinya NU di Manado adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut faham *Ahlussunah wal Jama'ah* di tengah-tengah kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Dasar NU Pasal 8 ayat 2, bahwa “Tujuan *Nahdlatul Ulama* adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.” Untuk tujuan ini dilakukan usaha organisasi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar NU Pasal 9, yaitu:

- 1) Di bidang agama, melaksanakan dakwah Islamiyah dan meningkatkan rasa persaudaraan yang berpijak pada semangat persatuan dalam perbedaan.
- 2) Di bidang pendidikan, menyelenggarakan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, untuk membentuk Muslim yang bertakwa, berbudi luhur, dan berpengetahuan luas.
- 3) Di bidang sosial-budaya, mengusahakan kesejahteraan rakyat serta kebudayaan yang sesuai dengan nilai keislaman kemanusiaan.
- 4) Di bidang ekonomi, mengusahakan pemerataan kesempatan untuk menikmati hasil pembangunan, dengan mengutamakan berkembangnya ekonomi rakyat.
- 5) Mengembangkan usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam rangka merealisasikan usaha-usaha tersebut, maka NU sebagaimana organisasi pada umumnya, mempunyai peraturan dasar dan peraturan rumah tangga sebagai dasar pijakan organisasi.

Karakteristik Kelembagaan Nahdatul Ulama di Manado

Berbicara tentang karakteristik organisasi sejatinya merupakan hal yang paling substansial dan asasi. Substansial karena setiap organisasi mempunyai karakteristik yang membentuknya, sekaligus yang membedakannya dengan organisasi lainnya. Asasi artinya bahwa setiap organisasi mempunyai landasan dasar dan spirit perjuangan dalam mencapai apa yang dicita-citakan. Pembacaan mengenai karakteristik dalam konteks organisasi, baik organisasi sosial, politik, maupun keagamaan, menjadi sangat signifikan dalam melihat wujud organisasi secara utuh dan integral.

Karakteristik NU cabang Manado, terletak pada lingkungan kelahirannya yang justru di tengah-tengah masyarakat kota yang modern dan minoritas Muslim. Terbentuknya NU di Manado, adalah berasaskan pada Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Sebagaimana umumnya, NU cabang Manado juga mendasarkan paham keagamanya kepada 4 sumber ajaran Islam, yaitu: Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Pemahaman dan penafsiran terhadap sumber-sumber tersebut, dilakukan berdasarkan paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, dengan pendekatan berdasarkan Keputusan Muktamar NU Tahun 1984, tentang "Dasar-dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama", sebagai berikut:

- 1) dalam bidang akidah mengikuti paham Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi;
- 2) dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari empat imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali;
- 3) dalam bidang tasawuf, mengikuti pemikiran Imam Al-Ghazali dan Imam Junaed Al-Baghdadi.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari itu semua, NU cabang Manado mengembangkan 4 konsep Aswaja dalam interaksi sosial masyarakat Islam di Manado, yaitu: *tasammuh* atau bersikap toleransi, *tawasuth* atau sikap moderat dalam seluruh aspek kehidupan, *al-i'tidal* atau bersikap tegak lurus dan selalu condong pada kebenaran dan keadilan, serta *tawazun* atau sikap keseimbangan dan penuh pertimbangan (Siddiq, 2005: 3; Jumat, 2012: 122-123).

Empat karakter di atas berfungsi untuk mengembangkan sikap toleransi agar terhindar dari sikap ekstrem dalam segala aspek kehidupan. Empat pegangan tersebut dikukuhkan dengan sikap lain, yaitu sikap mempertahankan tradisi lama yang baik seraya menerima hal-hal baru yang lebih baik (*al-muhafadhatu 'ala al-qadimi wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*) (Ali & Nurhuda, 2008: 22).

PCNU Manado secara khusus mengusahakan tegaknya pelaksanaan syariat agama Islam berfaham *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam segala aspek kehidupan secara dinamis, berupa memahami dan menghayati setiap perubahan, pengembangan dan tuntutan yang semakin meningkat dalam masyarakat, agar tidak mudah tergilas oleh hedonisme, modernisasi dan globalisasi.

Sebagai bentuk usaha dari itu semua, Sakti Sutan zah Kader (Sekretaris Wilayah LDNU Sulut) menerangkan bahwa dalam bidang dakwah, para pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mengadakan kegiatan majelis taklim, seperti Majelis Ashhabul Musthofa yang dilaksanakan setiap malam Jum'at dan pengajian yang dilaksanakan oleh Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama setiap malam Kamis. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Suwarno Tuiyo (Sekretaris PWNU Sulut) bahwa dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para juru dakwahnya. Semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan dan pelestarian amaliah-amaliah khas NU di antaranya sholawatan, tahlilan, ziarah makam dan lainnya.

Dalam bidang pendidikan, NU tidak hanya aktif dalam pengembangan Lembaga Pendidikan Ma'arif yang ada di Manado, tetapi juga turut aktif dalam pengembangan lembaga-lembaga pesantren yang secara kultur bercorak Aswaja.

Dalam bidang sosial budaya, dilakukan kegiatan-kegiatan seperti: pembinaan para mualaf, membantu warga yang terkena bencana alam, melakukan pendampingan kepada para

Pekerja Seks Komersial (PSK), melaksanakan kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan usaha kemandirian kepada ODHA (Orang Dengan HIV Aids) dan Waria, menyelenggarakan pelatihan “motivasi berprestasi” bagi para pengurus dan anggota IPNU/IPPNU, Anshor dan fatayat, dan masih banyak program-program lain yang sudah dan masih terus dijalankan hingga sekarang.

Adapun dalam bidang ekonomi, menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi warga berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM), pembentukan dan pemberdayaan koperasi, dan membentuk kelompok-kelompok tani yang berusaha ke arah peningkatan produksi pertanian, serta pengembangan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi masyarakat Manado.

Sebagaimana warga NU pada umumnya, warga NU di Manado juga sangat kuat mengamalkan tradisi keagamaan semacam tahlilan, selamatan/syukuran, ta'ziah, maulid Nabi, *khaul* (memperingati 7, 40, 100 hingga 1000 harinya orang yang sudah meninggal), ziarah wali, *istighasah*, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi keagamaan seperti ini semakin marak seiring dengan pertumbuhan jumlah pesantren di Manado dan perkembangan pedidikannya. Bahkan dari pengamatan penulis, diketahui bahwa kegiatan-kegiatan seperti shalawatan dan barzanji atau pembacaan *diba'* (syair-syair tertentu berisi pujian-pujian terhadap Nabi Muhammad), semakin meluas di Manado.

Visi, misi dan struktur kelembagaan organisasi NU di Manado

NU cabang Manado sama seperti cabang NU pada umumnya, memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai landasan dalam menyelenggarakan program organisasinya. Adapun visi dan misi dimaksud, yaitu:

Visi: “Terwujudnya masyarakat sejahtera yang dijiwai ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkemakmuran dan berkeadilan yang diridhoi Allah SWT”.

Adapun misi organisasi NU antara lain:

- 1) Melaksanakan Dakwah Islamiyah *Ahlussunnah wal Jama'ah* dalam membimbing umat menuju masyarakat *mutamaddin*.
- 2) Memberdayakan lembaga pendidikan dan pesantren untuk meningkatkan kualitas sumber daya insani yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berakhlak.
- 3) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan ekonomi umat.
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum yang berkeadilan.
- 5) Menumbuhkembangkan budaya demokrasi yang jujur dan adil
- 6) Mendorong kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Visi dan misi di atas, harus mampu dijadikan sebagai sumber berfikir, bersikap dan bertindak bagi pengurus dan warga NU secara keseluruhan dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Sebagai pijakan administrasi organisasi, maka NU memiliki kelengkapan tata kerja organisasi, yakni struktur organisasi yang dibentuk mulai dari tingkat pusat hingga tingkat

desa. Dalam AD ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) NU Pasal 12 disebutkan untuk posisi di pusat disebut PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), di wilayah disebut PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama), kemudian di tingkat kabupaten disebut PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) dan PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama), tingkat kecamatan disebut PMWCNU (Pengurus Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama), dan yang terbawah ada Pengurus Ranting NU dan Pengurus Anak Ranting NU.

Kemudian dalam Pasal 13 dan 14 AD ART NU dijelaskan struktur pengurus NU di PBNU, PWNU, dan PCNU dilengkapi dengan Mustasyar, Syuriah dan Tanfidziyah. Selain itu juga dilengkapi dengan Banom (Badan Otonom), Lembaga, serta Lajnah yang menjadi unit operasional kegiatan program NU (AD ART NU).

Suwarno Tuiyo menjelaskan tidak semua kelengkapan organisasi, seperti lembaga, lajnah dan banom yang ada di tingkat kepeguruan cabang NU, ada dan dibentuk di PCNU Manado. Berdasarkan Data Pengurus Cabang Lembaga, Lajnah, dan Banom NU Sulawesi Utara, diketahui lembaga NU yang ada di Manado, yaitu: Lembaga Dakwah NU (LDNU), Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU (LAKPESDAM NU), Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, Lembaga Perekonomian NU (LPNU), Lembaga Kesehatan NU (LKNU), Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU), Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia NU (LESBUMI NU), dan Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LP2NU).

Adapun dalam Data Pengurus Cabang Lembaga, Lajnah, dan Banom NU, lajnah yang ada di PCNU Manado hanya Lajnah Falakiah NU (LFNU). Sementara untuk Banom NU di Manado terdiri dari: Muslimat NU, Gerakan Pemuda Anshor, Fatayat NU, Ikatan Palajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Palajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Persatuan Guru NU (Pergunu NU), *Jami'atul Qura wal Huffaz* (JQH), dan Pencak Silat NU Pagar Nusa.

Seluruh perangkat organisasi di atas, adalah satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari NU, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memelihara paham Aswaja dan menciptakan kemaslahatan umat dan kemajuan bangsa.

Tranformasi Pemikiran dan Gerakan NU Pasca Kemerdekaan di Manado

a. Masa Orde Lama (1955-1966)

Setelah keluar dari Masyumi, NU menjalin kedekatan dengan Soekarno. Kedekatan institusi NU dengan Soekarno, menjadikan wajah perpolitikan NU selama masa Orde Lama (1955-1966), cenderung akomodatif dan moderat. Tidak mengherankan jika pada masa ini, NU mendapat "pos-pos strategis" di panggung kekuasaan, baik di legislatif maupun di eksekutif. Jabatan menteri agama adalah jabatan yang menjadi milik NU dari waktu ke waktu (Shodiq, 2004: 99).

Terdapat beberapa peristiwa penting yang mewarnai perpolitikan NU pada masa Orde Lama khususnya tahun 1955-1966. *Pertama*, setelah mampu menempatkan diri di posisi ketiga pada Pemilu 1955, maka NU telah membuktikan dirinya sebagai partai politik yang handal

yang tidak hanya mampu mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, akan tetapi juga mempertahankan diri dalam percaturannya dengan partai-partai lain yang ada ketika itu (Shodiq, 2004: 100). NU secara makro dapat mempertahankan eksistensi dirinya dengan baik pada saat Partai Masyumi cenderung kurang mampu bekerja sama dengan kebijakan Soekarno dan akhirnya dibubarkan.

Kedua, sikap kritisisme politik NU terhadap eksistensi dan kebijakan pemerintah Orde Lama yang dinilai tidak *credible* menjalankan kekuasaannya. Opini bahwa ada keterlibatan Soekarno dalam gerakan PKI, menjadi salah satu masalah yang krusial yang dijadikan landasan bagi kritisisme politik NU (Shodiq, 2004: 101). Sayangnya, sepanjang penelitian ini dilakukan, baik arsip maupun informasi yang menunjukkan bahwa NU telah berdiri pada tahun 1955 atau sebelumnya, tidak penulis dapati. Sebuah artikel tentang “Sejarah Islam di Sulu” hanya menyebutkan bahwa menjelang Pemilu 1955 terdapat dua partai Islam yang besar di Manado, yaitu Partai Masyumi dan PSII.

Keberhasilan NU di tingkat daerah khususnya Manado, memang tidak sebagus dengan yang diraihinya di tingkat pusat. Tampaknya aktivitas NU di level daerah, khususnya di wilayah Indonesia Timur pada masa itu, tidak begitu menonjol. Tetapi secara nasional ke-Indonesiaan, NU jelas memiliki posisi tawar, mengingat keberadaannya yang cukup diperhitungkan sejak masa kolonial.

Kegagalan NU di tingkat daerah bisa dimaklumi karena memang mayoritas distrik pemilihan di luar Pulau Jawa pada Pemilu 1955 lebih didominasi oleh Partai Masyumi. Partai pimpinan M. Natsir ini menang di distrik pemilihan Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Demikian pula di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Maluku, Masyumi menang tipis vis a vis PNI (Komunitas Selamatkan Indonesia, 2016).

Meskipun demikian peran ulama di luar Jawa seperti Manado, masih terbilang penting dalam menyatukan suara masyarakat. Penulis mengamati adanya kecenderungan masyarakat Manado dalam mematuhi dan menghormati ulama. Kehadiran ulama di tengah-tengah mereka, dianggap sebagai sosok kharismatik yang bisa memberikan bimbingan menuju jalan yang benar. Bisa dibilang, ulama merupakan kekuatan yang juga berfungsi sebagai kunci stabilitas dalam masyarakat.

Peran ulama di Manado, sangat diharapkan oleh NU karena popularitas dan posisinya yang sangat strategis. Pada umumnya, masyarakat Indonesia menganggap mereka sebagai sosok yang memiliki kelebihan. Ulama dianggap sebagai seorang yang mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianggap keramat oleh masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pengaruh ulama dan eratnya hubungan mereka dengan santri dan masyarakat sekelilingnya, merupakan faktor penentu bagi keberhasilan NU baik ketika menjadi *jam'iyah* maupun sebagai partai politik (Anam, 1985: 299)

Menurut Abdul Gani Ibrahim (Mantan Ketua GP Anshor Tahun 1985-1988), setelah berdirinya pada tahun 1960, NU di Manado terus mengalami perkembangan. Ini karena NU pada masa itu, mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Soekarno. Bahkan ketika Presiden Soekarno menerapkan kebijakan Nasakom yang melibatkan kelompok komunis, pada

awalnya NU mendukung kebijakan tersebut sekalipun hal itu membuat posisi NU sangat dilematis. Di satu sisi NU mempunyai kedudukan yang dekat dengan Soekarno namun di sisi lain NU sangat membenci PKI.

Ketika tindakan PKI semakin jelas dengan memberikan pelatihan dan perlengkapan militer kepada pemuda-pemudanya, maka NU pun segera mengkoordinir pemuda-pemudanya dari PMII, dan Anshor dari pusat hingga daerah, untuk melatih mereka dalam mengimbangi usaha PKI tersebut (Saifullah, 19998: 49).

Setelah tragedi berdarah tahun 1965 (sebagai akibat tindakan makar PKI yang gagal), sikap tegas NU pun diambil, ia lebih mementingkan kemaslahatan umat. NU yang awalnya mendukung Nasakom, menjadi berbalik menghancurkan Nasakom dan ikut berperan aktif dalam penumpasan PKI (Feillard, 2009: 95). Menurut Anam (1985: 244) Sikap Keras NU terhadap PKI bukan hanya karena motivasi politik, tetapi yang paling dominan adalah motivasi agama. Tragedi ini kemudian dikenal dengan Gerakan 30 September PKI (G30S PKI).

Gani Ibrahim (2016) mengungkapkan bahwa ketika pecah G30S PKI, NU di Manado mengerahkan Pemuda Anshornya dan membentuk Barisan Komando Pemuda G30S PKI, kemudian bersama Pemerintah, bahu membahu melumpuhkan percobaan kudeta yang dilakukan oleh kelompok komunis tersebut. Ia kemudian melanjutkan bahwa ketika itu dirinya ditugaskan sebagai Komandan Kompi selama setahun.

b. Fase Orde Baru (1966-1998)

Penumpasan PKI segera disusul dengan pembubaran PKI secara formal, sehari setelah ditandatanganinya Surat Perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno (Anam, 1985: 244). Peristiwa ini sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan kemudian digantikan oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (Shodiq, 2004: 102).

Setelah PKI berhasil dibubarkan pada 1966, maka pada 1967 “Komando Pemuda” yang dibentuk GP Anshor Manado untuk menumpas PKI, juga dibubarkan. Selanjutnya, GP Anshor aktif dalam kegiatan pelatihan militer.

Awal pemerintahan Orde Baru, NU masih menjadi sebuah partai yang terbesar menggantikan posisi Masyumi yang telah dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960. Pada masa ini NU selalu dicurigai sebagai kekuatan yang mengancam, karena NU selalu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak demokratis. Akibatnya, pada tahun 1969 aktivitas NU di Manado mengalami kemandekkan. Banyak warga NU yang PNS maupun non PNS yang berada di pemerintahan, kemudian berhenti atau tidak aktif lagi dalam organisasi, karena takut akan kehilangan pekerjaan dan jabatan mereka.

Pada tahun 1971, NU kembali mengikuti Pemilu dengan penuh keyakinan akan meraih kemenangan. Namun yang ditargetkan meleset karena Golkar muncul sebagai mayoritas yang jauh meninggalkan pesaing-pesaingnya (Feillard, 2009: 158). Kemenangan Golkar ini tidak lepas dari kerja keras pemerintah, dengan melakukan kekerasan-kekerasan terhadap siapa saja yang tidak sepeham dengannya, baik secara fisik maupun psikologis (Shodiq, 2004: 104).

Gani Ibrahim (2016) menjelaskan, pada waktu itu sebagian di antara warga NU di Manado, terpaksa mendukung dan bahkan bergabung dengan Golkar, karena takut kehilangan pekerjaan atau kehilangan posisi di pemerintahan, terutama bagi mereka yang berstatus sebagai PNS. Meski demikian, pada pemilu 1971, NU merupakan partai Islam terkuat di wilayah Manado dengan perolehan suara sekitar 9 % suara (Laporan Hasil Pemilu DPR 1971 Sulawesi Utara, dalam www.pemilu.asia, diakses tanggal 21 Agustus 2016). Sementara PSII menang di distrik pemilihan Bolaang Mongondow (Bolmong).

Pada tahun 1973, pemerintah Orde Baru membuat penyederhanaan partai politik (1973-1975), dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas (1983-1985). Semua itu dilakukan untuk menjadikan Golkar sebagai partai terkuat dan memegang dominasi mayoritas tunggal (Daman, 2001: 142-143).

Berfusiya NU ke PPP, disambut baik oleh warga NU di Manado yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif umat Islam dari pada kepentingan organisasi (Gani Ibrahim, 2016). Nampaknya bagi warga NU di Manado yang terpenting adalah bagaimana mengembangkan dan mempertahankan peran politik umat Islam – dari partai dan organisasi manapun – untuk menciptakan keseimbangan sosial-politik Islam-Kristen di Manado.

Berbagai situasi di atas memaksa NU harus bersikap akomodatif terhadap pemerintah Orde Baru, hingga akhirnya pada Mukhtamar 1984, NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1926. “Kembali ke khittah” berarti NU kembali kepada jati dirinya sebagai organisasi sosial keagamaan. Dengan khittah itu pula dirumuskan konsep hubungan Islam dengan Pancasila oleh K.H. Ahmad Siddiq.

Meski Mukhtamar NU yang ke-27 telah dilaksanakan pada tahun 1984, tetapi di wilayah Sulut khususnya Manado, belum juga dibentuk ulang kepengurusan yang baru. Karena pasca pemilu tahun 1977, aktivitas NU di Manado hampir tidak terlihat sama sekali. Ust. Wahab (Rais Syuriah PWNU Sulut / Ketua MUI Sulut) mengungkapkan:

“Pada waktu itu, NU di Sulut bisa dibilang “mati suri”, karena adanya aturan-aturan oleh pemerintah bahwa PNS tidak boleh ikut serta (menjadi pengurus) dalam organisasi kemasyarakatan. Nanti setelah tahun 1985, baru ada perubahan dan PNS dibolehkan untuk menjadi pengurus dalam organisasi kemasyarakatan. Tahun 1986 saya dan beberapa orang lainnya atas usulan K.H. Hasyim Arsyad, berkumpul mengadakan rapat membentuk pengurus NU yang baru. Rapat kemudian diadakan di Balai Pertemuan Kota Manado. Itulah awal bangkitnya NU di Sulut (Abdul Wahab Abdul Ghafur, 2016).”

Hasil rapat tersebut menghasilkan susunan pengurus sebagai berikut:

Rais Syuriah	: K.H Hasyim Arsyad
Katib	: Abdul Wahab Abdul Gafur
Ketua Umum	: H. Sunbiki
Sekretaris	: Abd. Rahman Latukawu

Setelah itu, aktivitas NU kembali aktif. Namun secara organisasi tidak lagi melakukan *politik practice*. Artinya anggota NU bebas berpolitik atas nama pribadi, tanpa membawa nama organisasi. Seperti H. Sunbiki, yang berpolitik namun atas nama pribadi. Ia adalah anggota

DPR Sulut. Namun ketika Gorontalo memisahkan diri menjadi sebuah provinsi Gorontalo, H. Sunbiki kemudian pindah ke Gorontalo dan menjadi anggota DPR di sana (Abdul Wahab Abdul Ghafur, 2016).

Pasca khittah itu pula, NU melakukan konsolidasi organisasi untuk membentuk kembali cabang NU di daerah lain yang ada di Sulut, selain Kota Manado. Hal ini berjalan lancar, dan saat itu terbentuklah PCNU Gorontalo, PCNU Minahasa, PCNU Bitung, dan PCNU Bolmong.

Berbagai macam kebijakan pemerintahan Soeharto selama masa Orde Baru, tidak bisa dipungkiri telah mengakibatkan perpecahan anggota di tubuh NU yang semakin mengancam keutuhan internal organisasi. Akhirnya untuk menyatukan suara tersebut dibuatlah suatu bentuk usaha untuk mewadahi suara kaum *Nahdliyin*, dengan cara membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini dibentuk pada tahun 1998 untuk menghadapi pemilu tahun 1999, dengan Gus Dur sebagai pendirinya.

Menurut Sarifa (Sarifa Fatmawati bin Syekh Abu Bakar, Anggota DPRD Kota Manado sekaligus Ketua Fatayat NU Manado tahun 2016 dan Ketua Banatul Khairaat) bahwa “Lahirnya PKB ini menimbulkan konflik internal tersendiri bagi warga NU di Manado, khususnya bagi para anggota dan pengurus NU. Pasalnya PKB ini meskipun dideklarasikan oleh dan untuk warga NU, tapi sifatnya umum. Artinya cakupannya tidak hanya warga NU tetapi siapa saja dari kelompok dan atau agama manapun termasuk non Muslim. Sementara orientasi utama NU di Manado jelas, selain untuk melestarikan tradisi Aswaja, juga untuk menciptakan suasana keseimbangan Islam-Kristen di Manado termasuk di bidang pemerintahan.”

Secara organisatoris sebagai anggota NU, mereka ingin bersikap patuh pada organisasi dengan mendukung berbagai kebijakan PBNU, termasuk mendukung PKB. Namun di sisi yang lain, mereka memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi politik umat Islam dalam mengimbangi dominasi politik non-Muslim di pemerintahan Manado.

Situasi demikian akhirnya menyebabkan keanggotaan NU terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama didominasi oleh “kalangan non pesantren” yang berafiliasi dengan PKB dan mendukung partai tersebut. Sementara kelompok kedua didominasi oleh “kalangan santri” yang lebih mendukung PPP dari pada PKB.

Kesimpulan

Pembentukan cabang NU di Manado diperkirakan terjadi pada tahun 1960 oleh Habib Abdurrahman Mulachele. Meski demikian, secara kultural, NU di Manado diperkirakan sudah ada sejak masuknya Alkhairaat di Manado pada tahun 1934, atau bahkan mungkin jauh sebelumnya. Ketidak pastian mengenai awal kehadiran NU di Manado, disebabkan oleh kurang terdokumentasinya rekam jejak NU di berbagai daerah termasuk Manado.

Sejak tahun 1960 – 1998, NU di Manado terus mengalami dinamika yang pasang surut. Setelah NU terbentuk di Manado pada tahun 1960, NU terus mengalami perkembangan selama masa Orde Lama karena hubungan NU yang sangat dekat dengan Soekarno. Namun ketika pecah G30SPKI pada Tahun 1965, NU di Manado mengerahkan Pemuda Anshor-nya dan

membentuk Barisan Komando Pemuda G30SPKI untuk membantu pemerintah melumpuhkan percobaan kudeta yang dilakukan kelompok komunis tersebut. Tumbangnya G30SPKI merupakan akhir dari masa pemerintahan Orde Lama yang kemudian diganti dengan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Berbagai kebijakan Soeharto pada masa Orba telah menimbulkan tekanan dan perpecahan anggota di tubuh NU yang semakin mengancam internal organisasi. Akhirnya untuk menyatukan suara tersebut, dibentuklah PKB pada 1998. Namun ternyata lahirnya PKB justru menimbulkan konflik internal tersendiri bagi NU di Manado, sehingga menyebabkan keanggotaan NU terbagi menjadi dua kubu. Kubu pertama didominasi oleh “kalangan non pesantren” yang berafiliasi dengan PKB dan mendukung partai tersebut. Sementara kubu kedua didominasi oleh “kalangan santri” yang lebih mendukung PPP dari pada PKB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus & M.F. Nurhuda Y., *Pergulatan Membela yang Benar: Biografi Matori Abdul Djalil*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Anam, Chairul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Sala: Jatayu Sala, 1985.
- Anwar, Ali, *Avonturisme NU: Menjejaki Akar Konflik Kepentingan-Politik Kaum Nahdhiyyin*, Bandung: Humaniora, 2004.
- Bruinessan, Martin Van, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994.
- Daman, H. Rozikin, *Membidik NU: Dilema Percaturan Politik NU Pasca Khittah*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Feillard, Andree, *NU Vis a Vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, Yogyakarta: LKiS, Cet. ke-3, 2009.
- Jumat, Gani, *Nasionalisme Ulama: Pemikiran Politik Kebangsaan Sayyid Idrus Bin Salim Aljufry, 1891-1969*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Kristeva, Nur Sayyid Santoso, *Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlussunah wal Jama'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Muhtadi, Asep Saeful, *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Jakarta: LP3ES, 2004.
- Ricklefs, M.C., *Mengislamkan Jawa: Sejarah Islamisasi di Jawa dan Penentangannya dari 1930 sampai Sekarang*, terj. FX. Dono Sunardi & Satrio Wahono, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Shodiq, Ja'far, *Pertemuan antara Tarekat & NU (Studi Hubungan Tarekat dan NU dalam Konteks Komunikasi Politik 1955-2004)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

HISTORIA ISLAMICA

Journal History And Islamic Civilization

<http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/historia/index>

(P-ISSN xxxxxxxx; E-ISSN: xxxxxxxx)

Vol. 1 Nomor 2 Tahun 2022

Shodiq, Muhammad, *Dinamika Kepemimpinan NU Refleksi Perjalanan K.H Hasyim Muzadi*, Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004.

Siddiqi, Achmad, *Khittah Nahdliyyah*, Cet. ke-3, Surabaya: Khalista, 2005.

Suma, Muhammad Iqbal, *Dinamika Wacana Islam*, Jakarta: Eurabia, 2014.

Website

Dg. Siame, Norma, “Perjuangan Sayid Idrus bin Salim Al-Jufri di Bidang Pendidikan Islam Sulawesi Tengah”, dalam www.artikelalkhairaat.pdf.ac.id/html. Akses tanggal 08 April 2016.

Komunitas Selamatkan Indonesia, “Mengingat Sejarah: Partai Pemenang Pemilu 1955”, dalam <https://bluejundi.wordpress.com/2014/07/04/>, diakses tanggal 27 April 2016.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Laporan Hasil Pemilu DPR 1971 Sulawesi Utara”, dalam www.pemilu.asia. Akses tanggal 21 Agustus 2016.

NU Online (Soeaaara Nahdlatol Oelama), “Jaringan Organisasi NU”, dalam <http://www.nu.or.id/about/jaringan>, Akses tanggal 15 Mei 2016.

Arsip

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdhatul Ulama, Hasil Keputusan Mukhtamar ke-33 NU. Jombang Jawa Timur 1-5 Agustus 2015 M/16-20 Syawal 1036 H.

Data Administratif Kantor Sekretariat PCNU Manado tentang Visi dan Misi PCNU Manado.

Data Pengurus Cabang Lembaga, Lajnah, dan Banom NU Sulawesi Utara.

Wawancara

Wawancara dengan Abdul Gani Ibrahim (Mantan Ketua GP Anshor Tahun 1985-1988), di Rumah, Jl. Televisi Kompleks Masjid TVRI, Banjar, Tikala, Manado, 27 Februari 2016.

Wawancara dengan Abdul Wahab Abdul Ghafur (Rais Syuriah PWNU Sulut / Ketua MUI Sulut), di Kantor LPPOM MUI Sulut, Jl. WR Supratman No. 10 A Manado (Samping Masjid Raya Ahmad Yani), Tanggal 12 Maret 2016.

Wawancara dengan Sakti Sutan zah Kader (Sekretaris Wilayah LDNU Sulut), di Rumah, Jl. Perum Bulog, Banjar, Kota Manado, Tanggal 9 Maret 2016.

Wawancara dengan H. Sarifa Fatmawati bin Syekh Abu Bakar (Anggota DPR D Kota Manado, Ketua Fatayat NU dan Ketua Banatul Khairaat), di Rumah, Jl. Hasanudin 14 Kel. Sindulang II, Manado, Tanggal 24 Februari, 2016.

Wawancara dengan Suwarno Tuiyo (Sekretaris PWNU Sulut), di Kantor LKKNU Sulut, Jl. Hasanuddin No. 14, Kampung Islam, Tuminting, Manado, Tanggal 24 Februari 2016.